

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN
BOYOLALI**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

ARUM INDRI HASTUTI
B200110309

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Arum Indri Hastuti
NIM : B 200 110 309
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahawa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, April 2015

Pembimbing



(Dr. Zulfikar, SE, M.Si)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN
BOYOLALI**

Arum Indri Hastuti

Jurusan Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi S1
Universitas Muhammadiyah Surakarta
arumindrihastuti@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and prove the influence of the financial statement presentation, accessibility of financial statements, internal control, external pressures, environmental uncertainty, management commitment, and implementation of performance based budgeting to the application of financial reporting transparency area. The object of this research is on the sectors in Boyolali.

The sampling method using census method (of all populations in the distribution of the questionnaire). The number of respondents who participated in this study as many as 125 employees. Techniques and methods of data analysis used in this study using multiple linear regression analysis with SPSS 21.

The results of this study indicate that the presentation of financial statements, accessibility of financial statements, internal control, external pressures, management commitment, and implementation of performance based budgeting has positive influence on the transparency of financial reporting application area. While environmental uncertainty does not affect the application of the transparency of financial reporting area.

Keywords: Statements Regional Keuanagn, accessibility Financial Statements, Internal Control, External Pressure, Environmental Uncertainty, Management Commitment, Pelaksanaan Performance-Based Budgeting and Financial Reporting Transparency Application Areas

A. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap isu transparansi keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor yaitu: 1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu konsekuensinya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Aliyah dan Nahar, 2012).

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berusaha untuk membudayakan transparansi di daerahnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus mengenai transparansi. Di Indonesia, setidaknya terdapat 12 kabupaten atau kota yang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai transparansi pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat (radarbanten.com). Beberapa Kabupaten atau Kota yang telah memiliki peraturan daerah tentang transparansi diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Solok, Kabupaten Magelang, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Beberapa daerah telah menerbitkan Perda terkait transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terbit. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah ini masih sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana. Transparansi pada hakekatnya dapat memberikan dampak yang positif pada organisasi secara khusus dan daerah secara umum. Kebanyakan perda transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakkannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan (Ridha dan Basuki, 2012).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Aliyah dan Nahar (2012), Ridha dan Basuki (2012), Diana (2012), serta Satyaningsih (2014). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah yang dilakukan dengan pengumpulan kuesioner yaitu variabel transparansi pelaporan keuangan, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan (Aliyah dan Nahar, 2012), pengendalian intern (Diana, 2012), tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen (Ridha dan Basuki, 2012), pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (Satyaningsih, 2014) dalam penelitian ini menggabungkan semua variabel tersebut. Saat ini masih belum banyak penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan, khususnya di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk menginterpretasikan.

B. LANDASAN TEORI

1. Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik, ekonomi pemerintah, dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholder* dalam melihat struktur dan fungsi pemerintah, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggung jawaban periode lalu. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002) dalam Nasution (2009). Transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan; investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

H₁=Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006) dalam (Aliyah dan Nahar, 2012). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

H₂=Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

4. Pengendalian Internal

Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi atau top manajemen, personel-personel lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal keandalan dari pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan Efisiensi operasi. Pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut (Baihaqi, 2004). Oleh karena itu sebelum auditor melakukan audit secara mendalam atas informasi yang

tercantum dalam laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu pengendalian intern.

H₃=Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

5. Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya (Ridha dan Basuki, 2012). Tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau system. Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Perubahan organisasi yang didasari kekuatan koersif akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik dari pada teknis (Ashworth, 2009). Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, khususnya terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi.

H₄= Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

6. Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan adalah kecenderungan organisasi untuk memodelkan dirinya pada perilaku organisasi lain (DiMaggio dan Powell, 1983). Ketidakpastian lingkungan termasuk di dalamnya *bench marking* dan mengidentifikasi praktik terbaik yang ada di lapangan (Tuttle dan Dillard, 2007). Ketidakpastian dapat disebabkan oleh berbagai hal di luar organisasi, seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya (Ridha dan Basuki, 2012).

H₅=Ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

7. Komitmen Manajemen

DiMaggio and Powell (1983) menyatakan bahwa komitmen manajemen terkait dengan profesionalisme. Perubahan komitmen dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi (Dacin *et al*, 2002). Paine (1994) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan

atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Proses dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter ditentukan oleh komitmen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Selznick, 1992 dalam Dacin, 2002). Transparansi merupakan salah satu nilai atau prinsip yang harus dipegang oleh organisasi dalam pengelolaan keuangannya (Ridha dan Basuki, 2012).

H₆=Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

8. Pelaksanaan Anggaran Berbasis kinerja

Anggaran sangat diperlukan dalam pelaksanaan program atau rencana kerja pemerintah daerah. Dengan kata lain anggaran merupakan acuan atau tolok ukur dari kemampuan daerah untuk menjalankan kekuasaannya membangun daerah. Seperti yang dikutip dari Mardiasmo (2006:61), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Maka untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik, pemerintah daerah harus bisa mengelola anggaran dengan efektif dan efisien agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

H₇=Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah

9. Penelitian Terdahulu

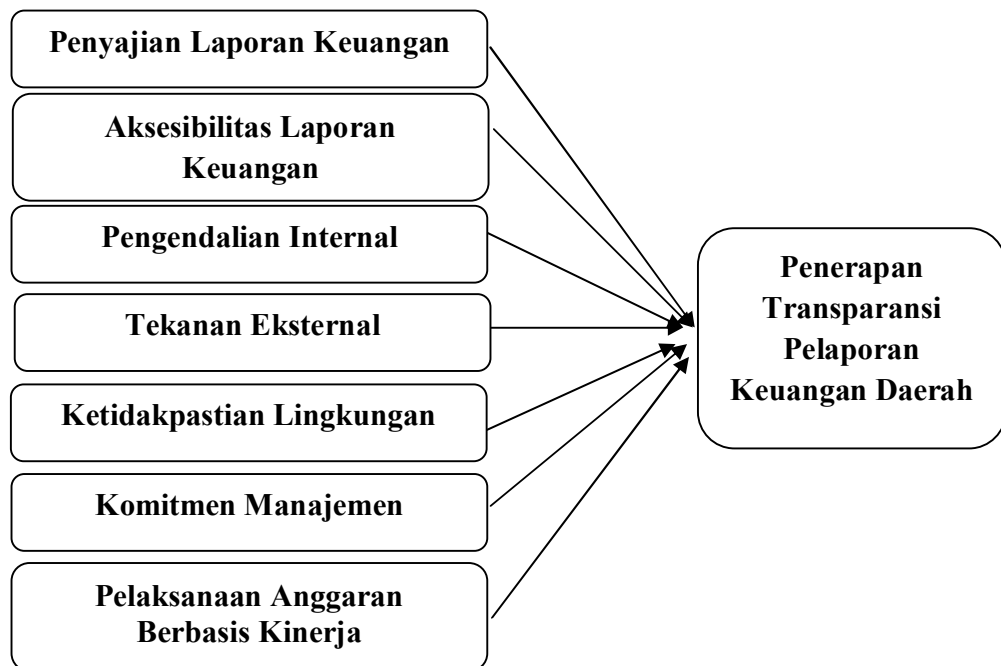
Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Aliyah dan Nahar (2012)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara	Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
Bandary (2011)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi	Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Penggunaan Informasi Keuangan

	Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)	Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)
Diana (2012)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengaruh Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sihaloho (2013)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan	- Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah - Ketidakpastian Lingkungan tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.
Satyaningsih (2014)	Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Ketidakpasian Lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung	Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Ketidakpasian Lingkungan berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung
Ridha dan Basuki (2012)	Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan	- Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi

	Daerah	Pelaporan Keuangan Daerah - Ketidakpastian Lingkungan tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.
--	--------	---

10. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam Penelitian ini:



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pegawai bagian keuangan di setiap SKPD Kabupaten Boyolali yang berjumlah 180 responden. Pemilihan sampel

dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sensus. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil pengembalian kuesioner dari responden sejumlah 125 responden.

3. Definisi Operasional Variabel dan Cara Pengukuran Variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah (Y), variabel independennya adalah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian intern, tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X). Semua variabel diukur menggunakan skala Likert yaitu dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai pernyataan perilaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro, 2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = netral, Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.

4. Data dan Sumber Data. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer. Dalam penelitian ini, sumber data yang didapat berdasarkan penyebaran kuesioner di semua bagian keuangan SKPD Kabupaten Boyolali.

5. Metode Analisis Data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, uji hipotesis, dan uji analisis regresi berganda. Persamaan uji regresi linier berganda:

$$\text{Trans} = \alpha + \beta_1 \text{PLK} + \beta_2 \text{ALK} + \beta_3 \text{PI} + \beta_4 \text{TE} + \beta_5 \text{KL} + \beta_6 \text{KM} + \beta_7 \text{PABK} + e$$

Keterangan: Trans	=	Transparansi
α	=	Konstanta
$\beta_1 - \beta_7$	=	Koefisien Regresi
PLK	=	Penyajian Laporan Keuangan
ALK	=	Aksesibilitas Laporan Keuangan
PI	=	Pengendalian intern
TE	=	Tekanan Eksternal
KL	=	Ketidakpastian Lingkungan
KM	=	Komitmen Manajemen
PABK	=	Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja
e	=	Error

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 180 eksemplar, kuesioner yang kembali sebanyak 125 eksemplar. Presentase jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini adalah sebanyak 42% dengan jumlah 52 orang dan presentase jumlah responden perempuan sebanyak 58% dengan jumlah 73 orang. Presentase kriteria pengalaman kerja < 5 tahun 19,2%, 5-10 tahun 26,4%, >10 tahun 54,4%. Presentase kriteria berdasarkan usia responden <30 tahun 0%, 31-40 tahun 35,2%, 41-50 tahun 40%, 51-60 tahun 24,8%. Presentase kriteria responden dalam bidang pendidikan terakhir yaitu SMA sebanyak 5,6%, D3 27,2%, S1 46,4% dan S2 dengan jumlah 20,8%.

Pada pengujian validitas menggunakan metode *Pearson Correlation*. Nilai r tabel yang diperoleh dari banyaknya sampel yang berjumlah 125 orang yaitu 0,148. Seluruh item pertanyaan sebanyak 45 pernyataan dinyatakan valid dengan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Variabel Y memiliki nilai 0,758, variabel X1 memiliki nilai 0,717, variabel X2 dengan nilai 0,841, variabel X3 dengan nilai 0,757, variabel X4 dengan nilai 0,907, variabel X5 dengan nilai 0,799, variabel X6 dengan nilai 0,710, dan variabel X7 dengan nilai 0,818. Jadi delapan variabel penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

Hasil uji normalitas data mendapatkan nilai Sig 0,509 atau lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semua data terdistribusi secara normal. Untuk uji heteroskedastisitas terlihat dari masing-masing variabel sebagai berikut penyajian laporan keuangan (X₁) nilai t_{hitung} sebesar -1,282 dan nilai sig sebesar 0,202, aksesibilitas laporan keuangan (X₂) nilai t_{hitung} sebesar -1,600 dan nilai sig sebesar 0,112, pengendalian internal (X₃) nilai t_{hitung} sebesar 0,681 dan nilai sig sebesar 0,479, tekanan eksternal (X₄) nilai t_{hitung} sebesar 0,914 dan nilai sig sebesar 0,363, ketidakpastian lingkungan (X₅) nilai t_{hitung} sebesar -1,347 dan nilai sig sebesar 0,181, komitmen manajemen (X₆) nilai t_{hitung} sebesar -0,182 dan nilai sig sebesar 0,856, dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X₇) nilai t_{hitung} sebesar 0,215 dan nilai sig sebesar 0,830. Dari masing-masing variabel nilai sig > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas dari masalah heterokedastisitas. Hasil uji multikolinieritas variabel penyajian laporan keuangan (X₁) nilai *tolerance value* sebesar 0,870 dan nilai VIF sebesar 1,149, aksesibilitas laporan keuangan (X₂) nilai *tolerance value* 0,712 dan nilai VIF sebesar 1,404, pengendalian internal (X₃) nilai *tolerance value* 0,673 dan nilai VIF sebesar 1,485, tekanan eksternal (X₄) nilai *tolerance*

value 0,921 dan nilai VIF sebesar 1,085, ketidakpastian lingkungan (X₅) nilai *tolerance value* 0,959 dan nilai VIF sebesar 1,042, komitmen manajemen (X₆) nilai *tolerance value* 0,890 dan nilai VIF sebesar 1,123, dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X₇) nilai *tolerance value* 0,950 dan nilai VIF sebesar 1,053 dan terlihat dari semua variabel nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga ketujuh variabel dinyatakan bebas multikolinieritas.

Hasil persamaan regresi liner berganda sebagai berikut:

$$\text{Trans} = 0,533 + 0,130\text{PLK} + 0,345\text{ALK} + 0,180\text{PI} + 0,107\text{TE} + 0,015\text{KL} + 0,115\text{KM} + 0,091\text{PABK} + e$$

Nilai koefisien dari masing-masing variabel independen bernilai positif yang memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan yang positif dari variabel penyajian laporan keuangan (X₁), aksesibilitas laporan keuangan (X₂), pengendalian internal (X₃), tekanan eksternal (X₄), ketidakpastian lingkungan (X₅), komitmen manajemen (X₆), pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X₇) terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah (Y). Variabel penyajian laporan keuangan (X₁) memiliki nilai t_{itung} sebesar 2,558 dan nilai signifikan sebesar $0,012 < 0,05$ yang berarti variabel penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Variabel aksesibilitas laporan keuangan (X₂) memiliki nilai t_{itung} sebesar 5,737 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Variabel pengendalian internal (X₃) memiliki nilai t_{itung} sebesar 3,402 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti variabel pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Variabel tekanan eksternal (X₄) memiliki nilai t_{itung} sebesar 3,095 dan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ yang berarti variabel tekanan eksternal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Variabel ketidakpastian lingkungan (X₅) memiliki nilai t_{itung} sebesar 0,279 dan nilai signifikan sebesar $0,781 > 0,05$ yang berarti variabel ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Variabel komitmen manajemen (X₆) memiliki nilai t_{itung} sebesar 2,140 dan nilai signifikan sebesar $0,034 < 0,05$ yang berarti variabel komitmen manajemen memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Variabel pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X₇) memiliki nilai t_{itung} sebesar 2,282 dan nilai signifikan sebesar $0,024 < 0,05$ yang berarti variabel pelaksanaan anggaran

berbasis kinerja memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 18,673 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, pengendalian internal, tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil nilai koefisien determinasi (R^2) untuk kedua variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,499 yang berarti bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, pengendalian internal, tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan sebesar 49,9% sedangkan sisanya 50,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk variabel penyajian laporan keuangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, yang mana ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,558 > 1,984$). Hal ini disebabkan karena dengan adanya penyajian laporan keuangan yang tinggi yang meliputi pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan SPI, penyampaian laporan keuangan daerah kepada BPK, inspektorat mereview laporan keuangan sebelum diserahkan kepada BPK, sitem informasi kepada publik, dan tepat waktu maka penerapan transparansi pelaporan keuangan akan meningkat.
2. Untuk hasil variabel aksesibilitas laporan keuangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, yang mana ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,737 > 1,984$). Hal ini terjadi karena adanya aksesibilitas laporan keuangan yang tinggi terhadap masyarakat, maka akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Untuk hasil variabel pengendalian internal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, yang mana ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,402 > 1,984$). Hal ini disebabkan dengan adanya pada organisasi memiliki kode etik, staf yang kompeten, dapat dipercaya, dan tanggap dengan perubahan, tugas dan jabatan terstruktur, kebijakan pemisahan tugas,

pemeriksaan independen, sistem informasi yang baik, pengawasan secara terus menerus dan periodik, pengendalian internal yang tinggi terhadap pegawai maka akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Boyolali.

4. Untuk hasil variabel tekanan eksternal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, yang mana ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,095 > 1,984$). Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan yang mengatur transparansi, tuntutan dari pemimpin daerah, pemberitaan di media masa tentang transparansi, kritikan dari masyarakat, perhatian dari LSM terhadap transparansi, tuntutan dari pengguna laporan keuangan, tekanan eksternal yang tinggi terhadap pegawai maka akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Boyolali.
5. Untuk hasil variabel ketidakpastian lingkungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, yang mana ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0,279 < 1,984$). Hal ini disebabkan diantaranya yaitu dengan adanya perubahan politik, kebudayaan di daerah tersebut, perubahan peraturan organisasi, dan pergantian pemimpin. Perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain.
6. Untuk hasil variabel komitmen manajemen dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, yang mana ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,140 > 1,984$). Maka, semakin tinggi komitmen manajemen, penerapan transparansi juga semakin meningkat. Sebaliknya, apabila komitmen manajemen menurun, penerapan transparansi semakin rendah. Hal ini disebabkan adanya komitmen pimpinan, staf yang handal dan kompeten dalam bidangnya, pendidikan yang berkelanjutan, dibangunnya budaya etis, serta partisipasi masyarakat. Maka akibatnya komitmen manajemen mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
7. Untuk hasil variabel pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah, yang mana ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,282 > 1,988$). Hal ini disebabkan oleh program dan kegiatan yang jelas, pembiayaan masing-masing program, sistem

informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai, peran pihak eksternal, penerapan efisiensi, pemisahan tugas antara lembaga control dan pengguna anggaran, kontrol pada *input* dan *output*, bertanggung jawab terhadap *output*, tepat waktu, dan berkualitas. Semua penyebab tersebut yang dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah.

E. PENUTUP

- 1. Kesimpulan.** Variabel yang berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali, sebagai berikut: Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas laporan keuangan, Pengendalian internal, Tekanan eksternal, Komitmen manajemen, Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yaitu ketidakpastian lingkungan.
- 2. Keterbatasan.** Penelitian yang dilakukan ini mempunyai keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti berikutnya. Adapun keterbatasan yang ada adalah sebagai berikut: Hasil penelitian ini tidak dapat disamakan untuk seluruh pemerintahan, karena ruang lingkup penelitian ini dan jumlah sampel yang terbatas hanya di SKPD Kabupaten Boyolali. Keterbatasan objek penelitian yang hanya pada SKPD di Kabupaten Boyolali saja. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei kuesioner, peneliti tidak melakukan wawancara, atau terlibat langsung dalam aktivitas pegawai pemerintah, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrument secara tertulis saja.
- 3. Saran.** Saran yang dapat diberikan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di SKPD yang ada di Kabupaten Boyolali, tetapi juga SKPD Kabupaten lainnya. Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi saja tetapi juga yang lebih tinggi. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas objek penelitian, tidak hanya pada pemerintah Kabupaten Boyolali tetapi juga di Kabupaten lainnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner saja, tetapi juga ditambah dengan melakukan wawancara secara langsung, agar peneliti dapat melihat langsung bagaimana responden memberikan jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti, ed. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189
- Ashworth, R., G. Boyne., dan R. Delbridge. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Bandary, Himmah. 2011. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)". *Skripsi*. Semarang: fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Diamond, Jack, 2002, "Performance Budgeting Is Accrual Accounting Required?". *IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department*.
- Diana, Sari. 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: SNAB Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional
- DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*.
- Frumkin, P. dan J. Galaskiewicz. 2004. Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Ghozali, Imam. 2005. "Teori, Konsep, Aplikasi Dengan Program Lisrel". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governace*. Jurnal Pemerintah, Vol 2, No.1, Hal 1-17.

- Mizruchi, M. S. dan L. C. Fein. 1999. The Social Construction of Organizational Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism. *Administrative Science Quarterly*.
- Mulyana, Budi. 2006. "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Nasution, Saufi Iqbal (2009). Pengaruh Penyajian Neraca SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Medan (tidak dipublikasikan).
- Noor, Juliansyah. 2014. *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Paine, L. S. 1994. Managing Organizational Integrity. *Harvard Business Review*.
- Ridha. Basuki. 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. SNA BANJARMASIN.
- Satyaningsih, et, el. 2014. *Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Klungkung)*. Vol 2 No.1 tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Program S1: Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Sihaloho, Johannes. 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir)*. Fakultas Ekonomi Akuntansi: Universitas Riau.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: "Transparency and Accountability in Public Financial Administration". UN DESA.
- Tuttle, B. dan J. Dillard. 2007. Beyond Competition: Institutional Isomorphism in U.S. Accounting Research. *Accounting Horizons*.